

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data-data dan berbagai analisis yang dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian terkait manajemen pasca konflik vertical yang ada di Pajangan, terutama terkait bagaimana mewujudkan perdamaian jangka panjang di kecamatan Pajangan. Untuk menguak dan menganalisis berbagai kejadian dan persoalan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah,

1. Terwujudnya perdamaian dalam tata kelola konflik sosial pada konteks konflik di Kecamatan Pajangan, terlihat dari apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik. Perjanjian damai merupakan salah satu perwujudan dari *peace making*. Ketika perjanjian damai telah disepakati, dapat dipastikan bahwa salah satu tahap krusial dalam mewujudkan perdamaian negatif telah terwujud. Dalam proses mewujudkan perdamaian dalam konflik di Pajangan tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak proses yang harus dilalui. Secara umum dalam mewujudkan perdamaian konflik di Pajangan, para pihak-pihak tersebut melalui tahap yaitu, *non litigasi(negosiasi dan mediasi)*, *rekonsiliasi dan coercive*. Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang digagas untuk sesegera mungkin mewujudkan perdamaian, tahap ini murni diprakarsai oleh tokoh masyarakat Bantul dan hanya dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, dan ditambah beberapa warga. Dalam proses ini belum efektif untuk mewujudkan perdamaian.
2. Terciptanya damai dengan adanya kesepakatan perjanjian damai yang harus diterapkan dan dijalankan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Maka hal selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan point-point tersebut. Karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat

penting dalam proses *peace keeping*, karena pada dasarnya proses ini merupakan proses yang harus terus berkelanjutan. Menyoroti kesepakatan damai yang telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada dasarnya apa yang terlihat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, telah tercipta situasi damai dan indahnya hidup berdampingan di tengah perbedaan. Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari penerapan kesepakatan damai, mulai dari bagaimana mengusut segala permasalahan intoleran yang menjadi isu sampingan,. Namun pada kasus yang berbeda justru, segala macam permasalahan intoleran yang menjadi isu sampingan disepakati untuk tidak diusut, tentu dengan berbagai pertimbangan. Selain itu ada upaya memberdayakan nilai lokal sebagai salah satu faktor penunjang *peace keeping*. Karena, ketika proses fasilitasi juga harus menghormati dan menghargai prakarsa, kebutuhan, kepemilikan dan legitimasi lokal, untuk menumbuhkan kapasitas lokal untuk perdamaian.

3. Ketika damai dirasa telah stabil, proses panjang selanjutnya perlu dilakukan, terutama dalam proses mewujudkan perdamaian jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan *Peace building* terutama yang memiliki kerentanan konflik. *Peace building* berorientasi pada pembangunan segala bidang dan semua sektor guna menanggulangi segala macam potensi konflik. Dalam konteks proses pembangunan perdamaian pasca konflik di Pajangan memulai segalanya dengan membuat skenario atau rencana kedepan, skenario dibuat dan dihadirkan dalam bentuk Visi dan Misi Kabupaten Bantul, baik jangka pendek hingga jangka panjang.
4. Pemerintah Kabupaten Bantul menyadari ketika penyelesaian akar konflik telah dicanangkan dalam proses jangka panjang. Mereka juga mengambil langkah cepat dan responsif terkait mengatasi konflik yang berbau SARA di Pajangan. Pembentukan lembaga yang khusus difokuskan pada pemeliharaan perdamaian terutama dalam hal mencegah sejak dini dan

mengatasi segala kemungkinan ataupun dapat lebih baik mendeteksi segala potensi konflik yang berbau SARA merupakan langkah cepat dan tepat bila melihat apa yang terjadi di Pajangan. Dalam hal ini pembentukan (FKUB), FKDM diharapkan sangat efektif hadir dalam kehidupan masyarakat, lembaga tersebut dapat disebut sebagai *community policing* yang dimana komunitas-komunitas dibentuk untuk ikut aktif menjaga keamanan sosial, melalui model *community policing* pihak berwajib akan dibantu oleh masyarakat untuk mengidentifikasi “provokator” atau individu yang cenderung berpotensi memobilisasi konflik.

5. Pada akhirnya, temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, manajemen pasca konflik yang dilakukan guna memutus rantai konflik di Pajangan, sudah terencana dan berjalan dengan baik, dimulai dari proses *peace making*, *peace keeping* dan *peace building* semua tahap tersebut telah tercermin dari setiap langkah yang diimplementasikan hingga saat ini. Dari keseluruhan proses manajemen pasca konflik dapat dikatakan bahwa negara masih menjadi aktor dominan (*Government Driven*) pada proses manajemen pasca konflik, hal tersebut dikarenakan negara merupakan pihak yang memiliki wewenang dan otoritas dalam membuat kebijakan dari suatu rencana kedepan. Namun, yang patut disayangkan adalah kurang signifikannya peran masyarakat yang dilibatkan/melibatkan diri dalam proses manajemen pasca konflik. Masyarakat masih dipandang hanya sebagai objek tujuan proses implementasi suatu kebijakan, bukan sebagai aktor penting yang harus diberdayakan dengan cara dimintai pertimbangannya, hal tersebut menjadi salah satu kekurangan yang ditemukan. Karena membangun suatu perdamaian seharusnya melibatkan semua pihak/*multistakeholders* dalam setiap tahap proses yang dilalui guna mewujudkan perdamaian jangka panjang.

B. SARAN

1. Konflik yang terjadi di Pajangan seharusnya menjadi pelajaran berharga kedepannya terutama bagaimana langkah antisipatif sebelum munculnya konflik dipermukaan. Karena selama ini, konflik yang muncul seharusnya tidak sampai membesar dan dapat dicegah. Peran-peran intelejen daerah seharusnya dimaksimalkan masuk kedalam jejaring kehidupan masyarakat, sehingga potensi konflik dapat diredam terlebih dahulu.
2. Terkait perdamaian yang telah terwujud antara masyarakat dan pemerintah, dapat dijaga keberlangsungannya, dengan cara mengutamakan koordinasi yang terus dibangun antara semua pihak. Mulai dari stakeholders pemerintahan yang terus bersinergi dan tidak lupa untuk tetap memaksimalkan peran masyarakat, karena selama ini, peran masyarakat tidak dimaksimalkan dalam proses manajemen pasca konflik. Karena melihat pentingnya sinergitas dari semua pihak dalam proses menjaga perdamaian yang diharapkan akan selalu langgeng dalam jangka waktu yang panjang.
3. Penelitian selanjutnya dapat intensif terhadap kajian berbagai kebijakan yang mendorong proses perwujudan perdamaian jangka panjang. Terutama mengkaji bagaimana efektifitas penerapan kebijakan dalam masyarakat, karena dalam rentang waktu selama satu tahun pasca konflik terjadi, ada keterbatasan dan kesan terburu-buru apabila ingin menilai keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program yang dicanangkan dalam jangka waktu yang panjang.